

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengelolaan Pendapatan Daerah yang transparan dan akuntabel telah menjadi tuntutan dalam upaya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mendorong setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dan melaksanakan tugas pokok fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan Pajak Daerah. Untuk melaksanakan mandat ini perlu adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur, sehingga penyelenggaraan pengelolaan pajak daerah dapat berjalan efektif, stabil dan dinamis.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Oleh karena itu, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi dan peranan Dinas Pendapatan Daerah Kota

Tasikmalaya maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 ini.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 ini adalah untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 ini adalah untuk meningkatkan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

## **1.3. Tugas dan Fungsi**

Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, sedangkan tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan dari sektor Pajak Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah khususnya di sektor Pajak Daerah;

- b. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah;
- c. pengendalian dan pengawasan pendapatan daerah di sektor Pajak Daerah;
- d. pengoordinasian tata kerja dan tata hubungan kerja di bidang pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
- f. pelaksanaan penggalan potensi pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah;
- g. pelaksanaan kerjasama dalam rangka penggalan potensi pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
- i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang pendapatan khususnya disektor Pajak Daerah;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Dari Tugas Pokok dan Fungsi di atas salah satu hal yang terpenting adalah meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah, sehingga mampu untuk meningkatkan kemandirian dalam membiayai belanja daerah.

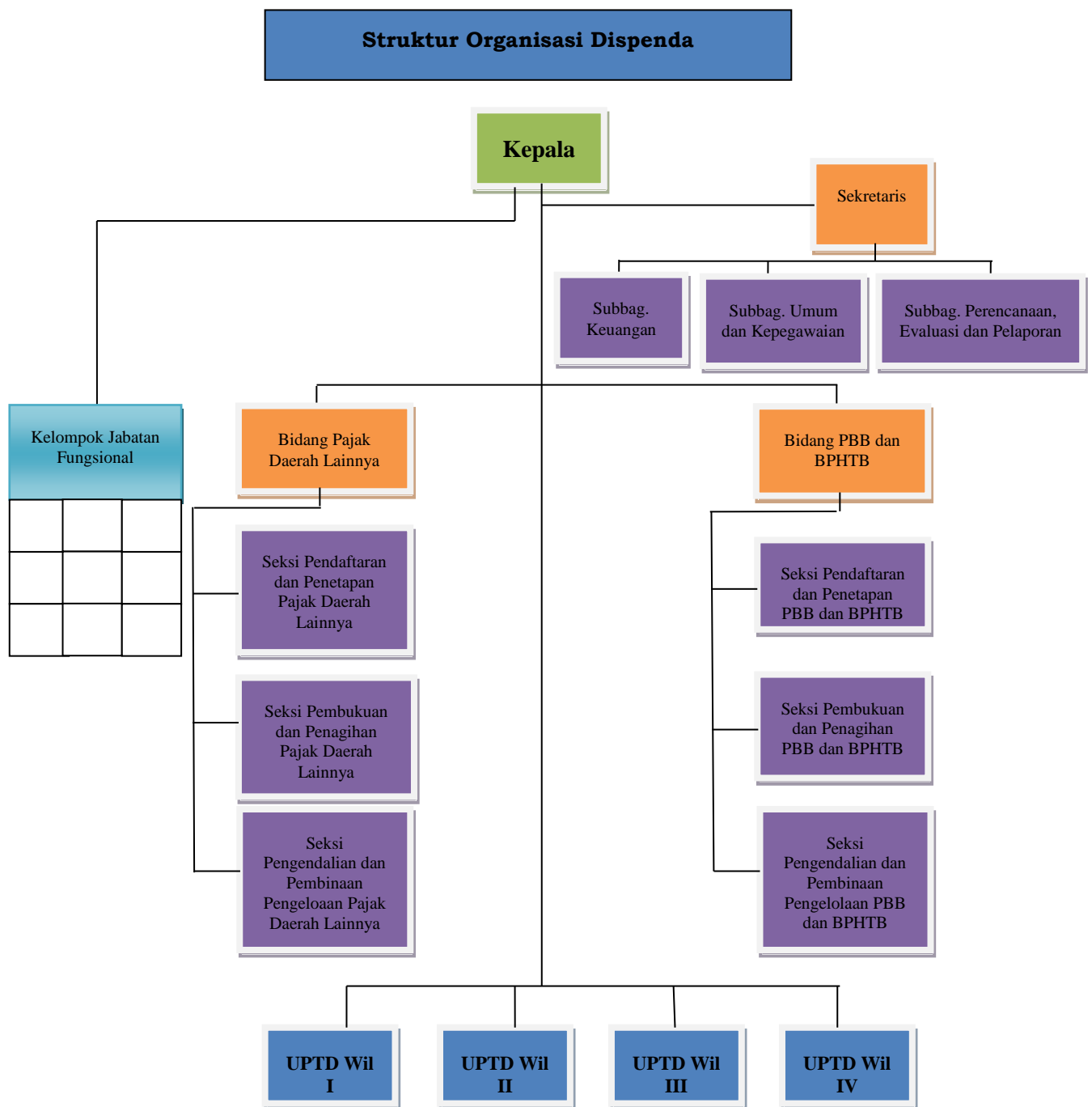
Ada beberapa isue strategis yang harus segera diselesaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah Kota Tasikmalaya diantaranya adalah :

1. Pelayanan Pajak Daerah yang belum optimal;
2. Sistem Informasi Pajak Daerah yang belum optimal;
3. Potensi Pajak Daerah belum seluruhnya tergali;
4. SDM Aparatur yang masih kurang dan belum memenuhi kriteria;

5. Koordinasi dengan Unit Penghasil dan Instansi terkait lainnya masih belum optimal;
6. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pendapatan Daerah khususnya di sektor Pajak yang masih kurang;
7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan PAD belum optimal.
8. Ketergantungan terhadap dana perimbangan dan bagi hasil pajak/bukan pajak masih tinggi;
9. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Pajak Daerah dan Pembayaran PBB masih kurang;
10. Aspek legalitas / aspek hukum di bidang Pendapatan Daerah yang dinamis dan selalu berubah.

#### **1.4. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya adalah sebagaimana pada gambar.1.1 dibawah ini:



**Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.**

### 1.5. Aspek Strategis Organisasi

Memperhatikan atas keberadaan tugas pokok dan fungsi Dispenda, yang diposisikan selaku OPD Penghasil dari pengelolaan pajak dalam tatanan suatu pemerintahan daerah, serta menyadari meningkatnya kebutuhan alokasi anggaran daerah untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan di daerah menjadikan tuntutan besar bagi Dispenda

dalam meningkatkan peranan dan kinerjanya di masa-masa mendatang. Penyusunan strategi peningkatan PAD khususnya dari sektor Pajak Daerah secara sistematis dan berkesinambungan bagi Dispenda haruslah menjadi fokus perhatian (*centre focus*), berbagai pembenahan baik dari sisi kelembagaan, personil maupun sumber daya lainnya serta penyusunan program dan kegiatan yang diarahkan untuk optimalisasi penerimaan pajak, harus senantiasa menjamin adanya sistem pengendalian dan evaluasi sehingga sinergis meningkatkan daya dukung dan akselerasi pemerintah daerah di bidang pendapatan.

Adanya perubahan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang semula sebagai sumber penerimaan pajak pusat menjadi pajak daerah serta pengembangan potensi-potensi baru dari jenis pajak daerah, memerlukan kesiapan kelembagaan dan personil dispenda di dalam penyelenggaraannya, beberapa tantangan dan peluang pelayanan perpajakan daerah di antaranya adalah :

1. Terdapat peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dengan strategi menilai kembali NJOP yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang.
2. Pengelolaan pajak daerah menjadi lebih kompleks dan menuntut kesiapan personil, sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya pendapatan asli daerah yang optimal guna membiayai pembangunan di Kota Tasikmalaya

### **1.6. Isu Strategis**

Berdasarkan analisa kondisi dan potensi pajak di Kota Tasikmalaya, setelah melalui pengkajian yang mendalam terhadap berbagai permasalahan maupun kebutuhan yang ada dan berkembang di

tengah-tengah kehidupan masyarakat maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang harus dijadikan fokus perhatian dan prioritas untuk dijawab melalui Renstra Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017 sebagai berikut :

1. Pelayanan Pajak Daerah yang belum optimal;
2. Sistem Informasi Pajak Daerah yang belum optimal;
3. Potensi Pajak Daerah belum seluruhnya tergali;
4. SDM Aparatur yang masih kurang dan belum memenuhi kriteria;
5. Koordinasi dengan Unit Penghasil dan Instansi terkait lainnya masih belum optimal;
6. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang masih kurang;
7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan PAD belum optimal;
8. Ketergantungan terhadap dana perimbangan dan bagi hasil pajak/bukan pajak masih tinggi;
9. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Pajak Daerah dan Pembayaran PBB masih kurang;
10. Aspek legalitas / aspek hukum di bidang Pajak Daerah yang dinamis dan selalu berubah.

### **1.7. Sistematika Penyusunan**

LKIP Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya disusun berdasarkan Permenpan No.53 Tahun 2014 dengan Sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang di hadapi organisasi.

## **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini di uraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **Bab III Akuntabilitas Kinerja.**

Pada bab ini menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran keuangan.

## **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi

Lampiran-lampiran

1.Perjanjian Kinerja

2.Lain-lain yang dianggap perlu



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Strategis

Gambaran ringkas perencanaan strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, meliputi :

**Visi “Sebagai Akselerator yang Handal di Bidang Pendapatan Daerah”**

yang mengandung makna bahwa Dinas Pendapatan Daerah sebagai suatu sarana bagi percepatan pendapatan di dalam mencukupi pendanaan berbagai kegiatan pemerintah dan pembangunan di pemerintahan Kota Tasikmalaya. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang akuntabel.
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pendapatan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pendapatan.

### 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi, tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi menunjukkan kondisi yang ingin dicapai serta berdasarkan pada isue dan analisis strategis.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sesuai dengan pedoman kepada Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2017, telah ditetapkan tujuan dan sasaran Strategik Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel. 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2017**

<b>VISI : Akselerator yang Handal di Bidang Pendapatan Daerah</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<b>MISI 1 : Meningkatkan sumber pendapatan daerah</b>	
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah</li> <li>2. Meningkatnya kualitas administrasi pendapatan daerah</li> <li>3. Meningkatnya pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah</li> </ul>
2. Meningkatkan potensi pajak daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya peningkatan pajak daerah sampai dengan tahun 2017, dengan indikator kenaikan penerimaan pajak daerah sebesar 10% per tahun</li> <li>2. Tersedianya perhitungan penerimaan pajak daerah berdasarkan database potensi pajak sampai dengan tahun 2017</li> </ul>
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penerimaan pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya peningkatan pengawasan dan pengendalian pajak daerah</li> <li>2. Tercapainya pengawasan pelaporan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah</li> <li>3. Menurunnya tingkat prosentase tunggakan (rasio antara tunggakan dengan realisasi penerimaan pajak)</li> <li>4. Meningkatnya fungsi Dinas Pendapatan sebagai koordinator pendapatan daerah</li> </ul>

**MISI 2 : Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia**

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia	1. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia, indikatornya meningkatnya kompetensi pegawai
	2. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, indikatornya terpenuhinya formasi pegawai sesuai dengan pembagian tugas
2. Mengembangkan birokrasi yang profesional dan akuntabel.	Terwujudnya lembaga dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

**MISI 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat**

1. Mewujudkan pelayanan prima	1. Terciptanya pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan prima, indikatornya meningkatnya transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan terhadap wajib pajak di wilayah Kota Tasikmalaya
	2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, indikatornya meningkatnya kompetensi pegawai dan kepuasan masyarakat
	3. Tersedianya dukungan anggaran, indikatornya terpenuhinya kebutuhan anggaran belanja dinas
	4. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan, indikatornya terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan yang mudah dan cepat diakses oleh masyarakat

**2.3. Perjanjian Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, akan mewujudkan 2 sasaran strategis dengan indikator sebagaimana terdapat pada tabel Penetapan Kinerja di bawah ini :

**Tabel. 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota**  
**Tasikmalaya Tahun 2015**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	<b>Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel</b>	Terpenuhinya kebutuhan cetakan fasilitasi administrasi pajak daerah dan retribusi daerah	1 Paket
		Terlaksananya penyediaan fasilitasi administrasi BPHTB dan PBB	1 Paket
		Tersusunnya draft rancangan APBD Bidang Pendapatan	2 dokumen
		Terlaksananya pengelolaan administrasi pendapatan yang akurat dan akuntabel	12 bulan
		Meningkatnya penerimaan PBB	10%
		Meningkatnya potensi BPHTB	10%
		Terwujudnya capaian penyediaan media reklame	4 media reklame
		Terlaksananya kajian strategis potensi pajak daerah untuk jenis pajak mineral bukan logam dan batuan	1 dokumen
		Terlaksananya penyempurnaan NIR dan ZNT	2 kec
		Terlaksananya evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah	4 kali
		Terwujudnya Optimalisasi Sistem Informasi Pajak Daerah berbasis Teknologi Informasi	1 Paket
		Terlaksananya pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah	100%
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB berbasis Teknologi Informasi	2000 WP
		Terlaksananya Intensifikasi dan Sosialisasi melalui Pembinaan dan Penyuluhan PBB dan BPHTB	10 kec
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Perpajakan Untuk Aparatur Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya	44 orang
		Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak untuk Membayar Pajak	4 kali
		Terlaksananya sosialisasi mengenai Peraturan Pajak Daerah	4 kali
Tersedianya Data Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan yang up to date	6.6759 OP		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Tersusunnya Data Wajib Pajak Daerah	1 Dokumen
		Terlaksananya Pengawasan, Kepatuhan dan Pengendalian Pajak Daerah Lainnya	12 Kali
2	<b>Meningkatnya pengendalian pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel</b>	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah	12 Kali

Dari Tabel 2.2 di atas dapat kita lihat bahwa dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya melaksanakan 3 Program dengan 21 Kegiatan dan membutuhkan Anggaran sebesar **Rp.7.036.645.000**

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian LKIP yang dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 1. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Di dalam Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Dinas Pendapatan Daerah, digunakan alat ukur sebagai berikut :

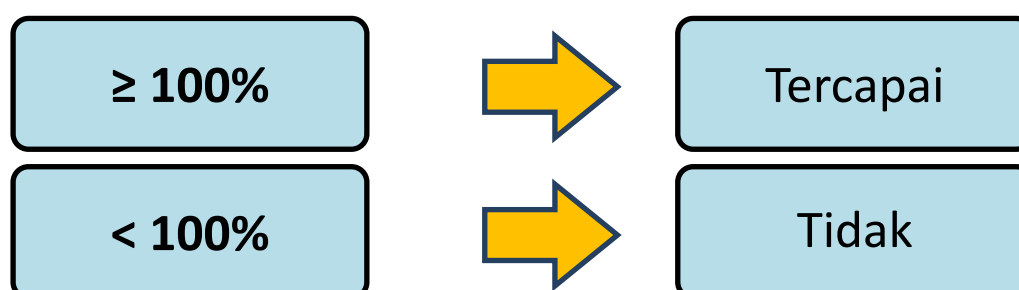
- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dari alat ukur di atas digunakan skala ordinal sebagai berikut :



## 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2015

Pada Tahun 2015, Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya melaksanakan 2 sasaran strategis yaitu :

- a. Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel;
- b. Sasaran strategis meningkatkan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel ini dijabarkan ke dalam 2 program yaitu :

- a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- b. Program intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah merupakan perwujudan dari sasaran tercapainya peningkatan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Adapun sasaran strategis meningkatkan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel diwujudkan dalam program pengendalian, monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah.

Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya pada Tahun 2015 berdasarkan Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel

3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Terpenuhinya kebutuhan cetakan fasilitas administrasi pajak daerah dan retribusi daerah	1 Paket	1 paket	100
		Terlaksananya penyediaan fasilitas administrasi BPHTB dan PBB	1 Paket	1 paket	100
		Tersusunnya draft rancangan APBD Bidang Pendapatan	2 dokumen	2 dokumen	100
		Terlaksananya pengelolaan administrasi pendapatan yang akurat dan akuntabel	12 bulan	12 bulan	100
		Meningkatnya penerimaan PBB	100%	100%	100
		Meningkatnya potensi BPHTB	10%	10%	100
		Terwujudnya capaian penyediaan media reklame	4 media reklame	4 media reklame	100
		Terlaksananya kajian strategis potensi pajak daerah untuk jenis pajak mineral bukan logam dan batuan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Terlaksananya penyempurnaan NIR dan ZNT	2 kec	3 Kec	100
		Terlaksananya evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah	4 kali	4 kali	100
		Terwujudnya Optimalisasi Sistem Informasi Pajak Daerah berbasis Teknologi Informasi	1 Paket	1 Paket	100
		Terlaksananya pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah	100%	10%	100



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB berbasis Teknologi Informasi	2000 WP	2000 WP	100
		Terlaksananya Intensifikasi dan Sosialisasi melalui Pembinaan dan Penyuluhan PBB dan BPHTB	10 kec	10 kec	100
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Perpajakan Untuk Aparatur Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya	44 orang	44 orang	100
		Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak untuk Membayar Pajak	4 kali	4 kali	100
		Terlaksananya sosialisasi mengenai Peraturan Pajak Daerah	4 kali	4 kali	100
		Tersedianya Data Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan yang up to date	6.6759 OP	6.6759 OP	100
		Tersusunnya Data Wajib Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Terlaksananya Pengawasan, Kepatuhan dan Pengendalian Pajak Daerah Lainnya	12 Kali	12 Kali	100
<b>2</b>	<b>Meningkatnya pengendalian pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel</b>	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah	12 Kali	12 kali	100

Dari tabel 3.1 di atas, terlihat bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 dapat direalisasikan sesuai dengan target masing-masing kegiatan.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2015 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

